

186

# FOKUS PERHATIAN

## PERKEMBANGAN ILMU KEPOLISIAN

(Suatu studi perbandingan)

Oleh : Hadi Saputro

### Pengantar

Atas prakarsa Gubernur PTIK melalui Dekan PTIK Prof. DR. Awaluddin Djamin MPA, pada tanggal 27 Oktober 1990 bertempat di Auditorium PTIK Jl. Tirtayasa Raya Kebayoran Baru, telah diadakan Pemaparan Ilmu Kepolisian dihadapan para Pakar beberapa Disiplin Ilmu dengan pembawa Makalah Utama Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Drs. Moersaleh MSc.

Selaku moderator pada sidang tersebut Mayor Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hadi Saputro, kemudian menyusun Artikel yang berjudul "Perkembangan Ilmu Kepolisian" (suatu studi perbandingan) sebagaimana di bawah ini.

### I Perkembangan di Jerman dan Belanda

Istilah ILMU KEPOLISIAN adalah terjemahan dari istilah POLIZEIWISSENSCHAFT yang sudah dikenal di Jerman (Prusia) sejak pertengahan abad ke-18 sebagai bagian dari KAMARELWISSENSCHAFTEN (Kameralien pengetahuan tentang finansi dan pemerintahan). Sebagai gabungan dari POLIZEIWISSENSCHAFT, "OKONOMIK dan FINANZWISSENSCHAFT telah diajarkan pada Universitas Pruisen (1727), Hessen (1730) dan Ostenrik (1752) <sup>1)</sup>.

Istilah POLIZEI pada waktu itu masih mengandung arti penyelenggaraan kesejahteraan umum (WOHLFAHRT) yang meliputi pemerin-

tahan umum (bestuur) dan perundang-undangan (wetgeving). Objek studi POLIZEIWISSENSCHAFT meliputi materi tentang pengertian tersebut, tetapi didalamnya sudah juga disinggung tentang aparat kepolisian.

Pada akhir abad 18 POLIZEIWISSENSCHAFT memisahkan diri dari KAMARALWISSENSCHAFTEN untuk berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Sesuai dengan perkembangan ilmu politik dengan dibedakannya pengertian POLIZEI dalam dua pengertian: WOHLFAHRT dan SICHERHEITSPOLIZEI (teori Catur praja: Justisi, Finansi, Bestuur dan Polisi), maka objek studi POLIZEIWISSENSCHAFT beralih kepada Sicherheitspolizei,

yaitu pencegahan bahaya terhadap warga masyarakat<sup>2)</sup>. Tetapi disamping menyempitnya objek studi, ada kecenderungan untuk metoda studinya pada aspek hukum, sesuai dengan POLIZEIRECHT (Hukum Kepolisian) yang sedang berkembang. Buku-buku yang diterbitkan pada perkembangan POLIZEIWISSENSCHAFT pada masa tersebut diantaranya ialah :

J.P. WILLEBRAND (Kepala Polisi kota Altona/Hamburg): *Abrege de la Police* 1765.

Dr.J.D.A.HOCK (Direktur Polisi Neurenberg): *Grundlinien der Polizeiwissenschaft* 1809.

Von MOHL : *Die Polizei-wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates* 1830.

Von RONNE dan SIMMONS: *Das Polizeiweswn der Pruisische Staates*. 1840.

ZIMMERMAN: *Die Deutsche Polizei im neunzehnten Jahrhundert*. 3 Jilid 1845.

Perkembangan yang mengarah ke studi Polisi juga terdapat di Prancis pada waktu itu dengan tokoh-tokoh seperti JOZEF FOUCHE dan tokoh DELAMARE yang menulis: *Traite de la Police* (4 jilid) pada tahun 1722. Di Belanda belum tumbuh perhatian kearah studi Polisi, meskipun telah terdapat beberapa penulisan tentang Polisi, diantaranya: S. NEUMARK: *Over het wezen en omvang van de Staatspolitie*. 1819.

Mr. PROVO KLUIT: (Direktur Polisi Amsterdam): *De Hervorming der Politie in Nederland. De zelfstandingheid der Politie verdedigd*. 1950.<sup>3)</sup>

Tahap kedua dari perkembangan studi Polisi dimulai sekitar pertengahan abad ke-19. Pengaruh perkembangan di Jerman mulai mendapat pengaruhnya di Belanda, yang juga menunjukkan adanya pendekatan hukum (*rechtswetenschappelijke studi*) mengarah ke *Politie-recht* (hukum kepolisian).

Sementara itu dengan tumbuhnya teori tentang organisasi (*Organisationslehre*) di Jerman (MAX WEBER: *The Theory of social and economic organizations*) perhatian utama dalam studi Polisi ditujukan kepada susunan dan kegiatan operasional dari aparat Polisi, meskipun tidak terpisahkan dari aspek-aspek yang mengandung ketentuan tentang hak-hak (*rechten*) dan kewajiban yang mendasarinya. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan adanya Undang-undang Kepolisian yang memuat dua aspek tersebut: penyusunan aparat dan hak-hak dan kewenangannya.

Bersamaan dengan itu, baik di Jerman maupun di Belanda mulai dipergunakan metoda ilmu alamiah dalam studi terhadap aparat Polisi, sehingga menumbuhkan "wetenschappelijke Politie" atau "police scientifique", yang kemudian dikenal dengan istilah "kriminalistiks"

dan diterjemahkan dengan POLICE SCIENCE. Sementara itu pendekatan kriminologis terhadap masalah Polisi menumbuhkan Antropologi Kriminil.

Maka dengan perkembangan dari dunia ilmu pada umumnya, pada pertengahan abad 19 POLIZEIWISSENSCHAFT (yang "asli") hancur dan terpecah-pecah dalam beberapa cabang ilmu, dimana obyek studinya dipecah-pecah (dikapling).

Dengan ungkapan FIJNAUT: "... in de 2e helft van de 19 eeuw ging de Polizeiwissenschaft tocht onder in een veelheid van nieuwe wetenschappen waartussen haar materieel object werd verkaveld" 4)

Dengan demikian timbullah POLIZEIWISSENSCHAFTEN (Politie-Wetenschappen, POLICE SCIENCES), dimana aparat Polisi menjadi bagian dari objek studinya, meskipun bagian yang terpenting.

Penerbitan buku-buku yang dikenal pada waktu itu diantaranya adalah: van EMPEL dan TINHOLT: Theorieboek voor de Politie.

H.M.J.WATTEL: Inleiding tot de beoefening van het Nederlandsche Politierecht 1912.

J.W.HAARMAN: Politie bevoegdheid 1913.

STAPEL dan de KONING: Leerboek voor de Politie 1906.

Di Jerman H. GROZ menerbitkan malah: Archiv fur Kriminalantropologie und Kriminalistik.

Disamping penerbitan buku-buku

dan majalah tersebut, sekitar tahun 1900 di Belanda juga telah dihasilkan penulisan karya tulis (proefschrift) mengenai kepolisian sebanyak 7 buah.

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan, bahwa dalam periode tahap ke-2 dari perkembangan studi Polisi ini timbul 2 istilah :

1. POLITIEWETENSCHAPPEN atau POLICE SCIENCES, yang merupakan cabang-cabang ilmu dalam studi Polisi, yang tumbuh dengan menggunakan metoda pendekatan secara ketata negaraan dan hukum, kriminologis dan teori organisasi.
2. WETENSCHAPPELIJKE POLITIE, atau Police Scientifique, dengan terjemahannya POLICE SCIENCE.

Perkembangan selanjutnya (tahap ke-3) berlangsung sejak pertengahan abad 20. Sejalan dengan pesatnya perkembangan khazanah ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu kemanusiaan/budaya, serta meningkatnya fenomena kriminalitas dalam pembangunan masyarakat secara lokal maupun regional, lebih mendorong pesatnya studi Polisi dengan menggunakan hasil-hasil dari perkembangan ilmu-ilmu tersebut, antara lain dari aspek-aspek psikologi, ekonomi, sejarah dan tehnologi. Apabila studi Polisi ini menyebar mulai dari Eropa Barat menyeberang ke Amerika Serikat, ternyata yang berkembang di negara terakhir ini malahan lebih

luas lingkungannya, sehingga akan di- contoh untuk perkembangan studi lanjutannya dinegara asalnya ialah Eropa.

Hal tersebut dianut oleh FIJNA- UT yang akan mengembangkan POLITIEWETENSCHAP yang baru (bisa diterjemahkan dalam Ilmu Kepolisian), yang akan meliputi 5 bidang studi, yaitu:

1. "Staatkundige Politie wetenschap", yang menyangkut hal ihwal ketentuan normatif tentang tugas dan tanggung jawab Polisi.
2. "Menswetenschappelijke Politie wetenschap", terutama ditujukan untuk mempelajari kenyataan berfungsinya aparat Polisi dalam rangka hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapainya, dan hal-hal lain yang menyangkut hubungannya dengan masyarakat, peng-organisasiannya, dan lingkungan masyarakat dimana ia berfungsi.
3. "Technologische Politie wetenschap", dimana sarana-sarana teknis dan kelembagaan dibina untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
4. "Historische Politie wetenschap", yang mempelajari Polisi secara sosial historis, tetapi juga mengarah ke wetenschapshistoris.
5. "Comperatieve Politie wetenschap", ialah studi perbandingan antara aparat-aparat kepolisian yang berkembang diberbagai negara. <sup>5)</sup>.

Demikian luasnya bidang studi Polisi ini, sehingga Politie Akademie sekarang ini dikemudian hari bisa berkembang menjadi lembaga universitas!

Mr. PETER van LOCHUM menyarankan penggunaan istilah POLITIEKUNDE <sup>7)</sup>.

Istilah "KUNDE" menunjukkan kepada pengertian "Ilmu", seperti pemakaian dalam istilah-istilah Aardrijkskunde (ilmu bumi), Meetkunde (ilmu ukur), Dierkunde (Ilmu binatang), Bestuurskunde (Ilmu Pemerintahan), Bedrijfskunde (ilmu perusahaan) dan lain-lain. Menurutnya, Politiekunde merupakan studi Polisi yang bersifat integral dan fundamental, dan merupakan suatu pembenaran untuk adanya ilmu yang berdiri sendiri tentang Polisi. Dalam POLITIEKUNDE dipelajari teori maupun praktek Polisi, sehingga juga mengandung pengertian KEAKHLIAN (dalam teori maupun praktek).

Ia menganggap hasil studi yang telah tercapai tentang aspek-aspek tertentu dengan menggunakan pendekatan suatu disiplin ilmu tertentu, menghasilkan POLITIEWETENSCHAPPEN (Ilmu-ilmu kepolisian) yang bersifat terpecah-pecah (fragmentasi) mengarah kesalah satu aspek secara monodisipliner. Maka POLITIEKUNDE akan mengandung 3 fungsi :

1. Fungsi menyusun (*Ôrdende functie*), ialah mengsistematisir produk-produk ilmiah yang telah dicapai (meng-integrasikan ilmu-

ilmu kepolisian).

2. Fungsi menyusun teori Polisi (Theorie-vormende functie), ialah menyusun azas-azas fundamental dan keteraturan yang terdapat pada phenomena Polisi. Dalam hal ini bisa mengarah ke 2 jurusan :

a. Ke SATU TEORI yang mencakup segala sesuatu tentang Polisi.

b. Menyusun kaitan antara teori-teori yang ada mengenai berbagai aspek dari tindakan Polisi.

3. Fungsi menterjemahkan (Vertalende functie), ialah untuk menguraikan ilmu-ilmu diluar Polisi, apabila perkembangan ini mempunyai arti untuk studi Polisi.

4. Ada aliran untuk membentuk suatu POLITIEWETENSCHAP

yang BARU, yang akan mengintegrasikan POLITIEWETENSCHAPPEN yang ada (FIJNAUT)

5. Ada penggunaan istilah POLITIEKUNDE yang bersifat mencakup dan mendasar tentang studi Polisi, yang akan mengkaitkan hasil-hasil studi yang ada (mengsystematisir POLITIEWETENSCHAPPEN), menyusun teori tentang Polisi, dan memanfaatkan perkembangan cabang-cabang ilmu lainnya yang relevan untuk perkembangan POLITIEKUNDE.

6. Objek studi tidak terbatas pada aparat Polisi saja, meskipun ia merupakan bagian dari objek studi yang terpenting.

## II. Perkembangan di Amerika Serikat

Meskipun dapat dikatakan belum tumbuhnya studi Polisi pada akhir abad 19 di Amerika Serikat, namun pada waktu itu telah terdapat penulisan-penulisan secara diskriptip tentang aparat-aparat Polisi, misalnya dari New York, Chicago dan lain-lain. Penulisan secara ilmiah dimulai pada permulaan abad ke-20, dan berlanjut sampai pertengahan abad 20. Pada saat itu berkembang ilmu administrasi yang mempelajari upaya bersama manusia mencapai tujuan bersama yang dipelopori oleh H. FAYOL (Perancis), MAX WEBER dengan teori birokrasinya (Jerman), F. TAYLOR dan E. MAYO (Amerika). Maka aparat Polisi dipelajari dengan pendekatan ilmu

## Kesimpulan :

1. Pengertian POLIZEIWISSENSCHAFT yang asli telah terhapus dengan menggesernya objek studi ke-arah SICHERHEITSPOLIZEI.

2. Studi aspek-aspek dari Polisi dengan penggunaan disiplin-disiplin ilmu tertentu menimbulkan adanya POLIZEIWISSENSCHAFTEN (diterjemahkan dengan POLICE SCIENCES).

3. Aspek sarana technologis yang dipelajari dengan ilmu alamiah menimbulkan "wetenschappelijke Politie" atau "Police Scientifique" yang sama dengan Kriminalistik, dan diterjemahkan dengan istilah POLICE SCIENCE.

administrasi, yang menghasilkan beberapa tulisan, antara lain:

LEONARD F. FULD: *Police Administration* 1909.

ELMER D. GRAPER: *American Police Systems* 1925.

RAYMOND B. FOSDICK: *American Police Systems* 1925.

ASOSIASI WALIKOTA: *Municipal Police Administration* 1936.

BRUCE SMITH: *Police Systems in the U.S.* 1940.

O.W. WILSON: *Police Administration* 1950.

U.A. LEONARD: *Police Organization and Management* 1951.

Kemudian studi Polisi sangat cepat lajunya, yang dikarenakan beberapa sebab, antara lain :

1. Meningkatnya kejahatan.
2. Kekhawatiran penduduk terhadap wewenang Polisi yang bisa membahayakan hak-hak azasinya.
3. Upaya membentuk aparat Polisi yang efektif didalam memberi perlindungan dan pelayanan terhadap warga masyarakat.

Maka lingkup studi Polisi sangat luas sekali, baik secara fenomenologis yang menghasilkan beberapa teori tentang Polisi seperti teori Social Control, teori Fungsional, teori pengaturan (regulatory), teori label, teori konflik dan teori pertukaran (exchange)<sup>8)</sup>, maupun studi terhadap segala aspek tentang Polisi, antara lain mengenai kepribadian, perilaku, budaya, hubungan antar ras di lembaga, praktek mengadili dijalan, kebijaksanaan memu-

tus dan banyak aspek-aspek lainnya, masing-masing disoroti dari satu atau beberapa disiplin ilmu. Suatu contoh: Buku NIEDERHOFER: *The Ambivalent Force*" yang menghimpun beberapa tulisan tentang Polisi mencatumkan dalam daftar Bibliografinya kurang lebih 500 (lima ratus) judul buku, majalah, karangan, sebagai bahan acuannya!<sup>9)</sup>.

Program studi Polisi diberikan di banyak Universitas, dengan sebutan program studi yang berbeda-beda, antara lain misalnya: LAW ENFORCEMENT, PUBLIC SAFETY, CRIMINAL JUSTICE, SCHOOL OF CRIMINOLOGY, POLICE ADMINISTRATION, POLICE SCIENCE TECHNOLOGY dan lain-lain sebutan lagi<sup>10)</sup>.

Dalam studi Polisi ini memang ada yang menyebut istilah POLICE SCIENCE, tetapi ternyata tidak terdapat kesefahaman tentang artinya.

Contoh: *Journal of Police Science and Administration*, menggunakan istilah Police Science dalam arti kontinental, ialah sama dengan Kriminalistik.

PERKINS dalam *Elements of Police Science*, menggunakannya dalam arti Politiewetenschap (ilmu kepolisian)<sup>11)</sup>.

SULLIVAN dalam bukunya: *Introduction to Police Science*, tidak memberi penjelasan tentang apa yang ia maksud dengan POLICE SCIENCE, tetapi jika diteliti isinya lebih banyak me-

ngandung pengetahuan Polisi (Politie kennis) yang diperlukan oleh setiap petugas Polisi. <sup>12)</sup>.

D.H. RIDDLE dalam karangannya: The emerging field of criminal justice, menggunakan POLICE SCIENCE dalam arti POLITIE-WETENSCHAPPEN, hal mana dapat disimak dalam uraiannya: ". . . . that Police Science does not possess its own theory and methodology. Rather this field draws its theories and techniques from other diciplins" <sup>13)</sup>.

#### Kesimpulan :

1. Di Amerika Serikat studi Polisi berkembang sangat pesat, dimulai dengan studi tentang pembinaan lembaganya (administrasi), yang sampai sekarang ini bidang studi ini masih menghasilkan banyak produk.
2. Perkembangan selanjutnya ialah studi tentang segala aspek kehidupan kepolisian yang didekati dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga menghasilkan produk-produk yang bisa diklasifikasikan dalam Politie wetenschappen. Objek studinya tidak terbatas pada Polisi, tetapi juga lingkunganya.
3. Telah diupayakan studi fenomenologis terhadap aparat Polisi, yang menghasilkan beberapa TEORI POLISI.
4. Program studi tentang Polisi diberikan pada sejumlah Universitas dengan penggunaan program studi yang berbeda-beda.

5. Istilah POLICE SCIENCE dipergunakan dalam berbagai pengertian ;
  - a. Sinonim dengan Kriminalistik.
  - b. Sebagai Politiewetenschap (PERKINS).
  - c. Sebagai Politiewetenschappen (RIDDLE).
6. Bibliografie tentang studi Polisi sangat lengkap <sup>14)</sup>.

### III. Perkembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia.

Periodisasi perkembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia diuraikan dalam karangan HADI SAPUTRO: "PROF. MR. DJOKOSOETONO: PELOPOR PERKEMBANGAN ILMU KEPOLISIAN DI INDONESIA" <sup>15)</sup>.

Secara kronologis perkembangannya secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Tidak dikenal apa yang dimaksudkan dengan Ilmu Kepolisian. Yang dipelajari pada lembaga-lembaga pendidikan Polisi adalah pengetahuan tentang Polisi yang diberikan oleh para praktisi Polisi Belanda dan Indonesia.
2. Pendirian AKADEMI POLISI tahun 1946. Meskipun merupakan pendidikan yang bersifat akademis, tetapi lebih dititik beratkan pada "Akademise vorming" dari para calon kader pimpinan Polisi dalam era

kemerdekaan, tanpa pernah terpikirkan tentang adanya ilmu kepolisian. Namun demikian, oleh para pengasuh terutama Prof. Mr. Soerjo Kolopaking para mahasiswa Polisi telah diterjunkan dalam kegiatan penelitian yang menyangkut masalah-masalah kepolisian.

3. Perubahan AKADEMI POLISI menjadi P T I K ( 1 September 1950).

Dengan dipergunakannya istilah ILMU KEPOLISIAN ( I K ), maka dengan sendirinya timbul pertanyaan mengenai apa yang dimaksudkan dengan Ilmu Kepolisian tersebut. Prof. Mr. DJOKO-SOETONO sebagai Dekan P.T.I.K. nampaknya menganut aliran yang berkembang di Jerman dengan adanya POLIZEIWISSENSCHAFTEN (POLICE SCIENCES) dan WISSENSCHAFTLICHEN-POLIZEI atau POLICE SCIENCE. Yang dianut untuk pengertian Ilmu Kepolisian adalah POLICE SCIENCES, sedangkan POLICE SCIENCE menunjukkan kepada Kriminialistik. Pendapat ini tidak diterima oleh Konsortium Ilmu Pengetahuan yang diketuai oleh Prso. SARDJITO. Meskipun demikian, kelangsungan P.T.I.K. tetap berlanjut, dan peran para Mahasiswa maupun para alumni P.T.I.K. sangat besar didalam menyumbang fikiran tentang Ilmu Kepolisian, melalui penelitian lapangan dan kepusta-

kaan, maupun dengan tulisan-tulisan, diantaranya dimajalah BHAYANGKARA. Lebih-lebih setelah para perwira Polisi dan lulusan P.T.I.K. dikirim untuk tugas belajar di Amerika Serikat, pemikiran-pemikiran mengenai Ilmu Kepolisian makin berkembang.

Pemikiran-pemikiran atau konsepsi tentang Ilmu Kepolisian yang diajukan antara lain oleh : Drs. SOEBADI SASTROSOEDJONO: "Apakah Ilmu Kepolisian suatu ilmu dan apakah "Leerstoel" Ilmu Kepolisian dapat dipertanggung jawabkan", ditulis tahun 1956.

Kemudian ia mengucapkan Pidato Dies tgl. 1 September 1975 yang berjudul: "Ilmu Kepolisian, dan fungsi P.T.I.K dalam mendukung pembangunan POLRI".

Drs. SAJONO sebagai Dosen P.T.I.K. membuat catatan-catatan tentang materi kuliahnya tentang: Ilmu Kepolisian.

Drs. HADI SAPUTRO sebagai Gubernur P.T.I.K. mengajukan konsep Ilmu Kepolisian yang sangat dipengaruhi oleh ajaran di Michigan State University, dimana ADMINISTRASI KEPOLISIAN merupakan inti (core) dari Ilmu Kepolisian.

Drs. MOERSALEH MSC yang dalam pidato Dies P.T.I.K. Th. 1973 yang berjudul "Penelitian Kepolisian", didalamnya menga-



jukan konsep tentang Ilmu Kepolisian. Konsep ini selanjutnya lebih disempurnakan untuk memenuhi persyaratan keilmuannya, antara lain dengan menentukan "PUBLIC SAFETY" sebagai Field of Study-nya.

Prof.Dr. PRAJUDI sebagai Dekan P T I K' dalam Pidato Dies th. 1976 yang berjudul: "Pentingnya studi tentang konflik sebagai salah satu sumber keamanan dan ketertiban masyarakat sehubungan dengan Ilmu Kepolisian, dalam rangka mendukung pembangunan nasional Indonesia. Ia telah memberikan pokok-pokok pikirannya tentang Ilmu Kepolisian, dan mengajukan pelunya POLICE SCIENCE CENTRE untuk mengembangkan Ilmu Kepolisian, yang penjelmaan-penjelmaannya menjadi Pusat Pengembangan ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK) yang terdapat pada PTIK sekarang ini.

Drs. WAHYUDI Menghasilkan penulisan berjudul: "Ilmu Kepolisian" dalam tahun 1977, yang materinya antara lain menyinggung aspek antropologis dari studi objeknya.

Sementara itu terdapat 3 Mahasiswa yang dalam skripsinya mengupas Ilmu Kepolisian, ialah SOEKAWADI, FAROUK dan GURNING'

Pembentukan Panitia Ilmu Kepolisian th. 1979.

Sebagai suatu usaha untuk memperkokoh status PTIK, maka Panitia ini dibentuk dengan tugas untuk merumuskan Ilmu Kepolisian.

Disamping konsep-konsep Ilmu Kepolisian yang telah ada yang diuraikan diatas, ditambahkan konsep-konsep baru dari :

Drs. BAGUS MUDAJADI SH, yang menyusun Ilmu Kepolisian dengan pendekatan sistemik dan menempatkannya sebagai bagian dari suprasistem dunia ilmu, dengan dilengkapi dengan penggambaran SCIENCE TREE-nya.

Drs. SOECIPNO yang juga mengajukan konsepnya dengan pendekatan sistemik, yang dititik beratkan pada proses kepolisian sebagai suatu sistem.

Perbedaan dalam konsep tentang pengertian Ilmu Kepolisian tidak memungkinkan menyusun SATU KONSEP yang diterima, namun ternyata bahwa konsep dari Drs. MOERSALEH MSC mengandung materi yang paling lengkap untuk memenuhi persyaratan sebagai ilmu. <sup>16)</sup>

5. Pembentukan Panitia Bersama Dep. P.D.K. dan MABAK th. 1980.

Pembentukan Panitia ini dimaksudkan untuk bisa menimbulkan apresiasi tentang adanya Ilmu Kepolisian oleh pihak Dep. P.D.K, dan dengan demikian juga melegitimasi adanya P T I K. Dari pihak Dep. P.D.K. diwakili oleh

Prof. PADMOWAHJONO SH dan Prof. Dr. SOEJOEDI.

Dalam pertemuan diskusi digelar kan pengertian Ilmu Kepolisian dengan menggunakan materi dari Konsep MOERSALEH, yang menimbulkan pengertian pada fihak yang mewakili Dep. P.D.K, bahwa ternyata Ilmu Kepolisian itu ada dan berhak untuk dikembangkan selanjutnya di PTIK. Disamping penerimaan Ilmu Kepolisian sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, disetujui bahwa pembinaan akademik dari PTIK akan dipegang oleh Dep. P.D.K. melalui Universitas Indonesia, dan bahwa Dekan PTIK akan ditunjuk oleh fihak Dep. P.D.K. sebagai pembina akademik sehari hari pada proses belajar mengajar di PTIK.

Sebagai Dekan ditunjuk: Prof. Dr. HARSYA W. BACHTIAR, seorang ilmuwan bidang Ilmu Sosial.

#### 6. Era Dekan Prof. Dr. HARSYA W. BACHTIAR 1990–1987.

Sebagai pembimbing akademis Dekan memberikan arahan didalam penyusunan Ilmu Kepolisian di Indonesia, yang dalam garis besarnya adalah :

6.1. Secara historis tumbuhnya Ilmu Kepolisian di Indonesia dari ilmu-ilmu yang telah berkembang, misalnya ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu sejarah, kefalsafahan, ilmu kedok-

teran dan lainnya, yang digambarkan sebagai akar-akar yang akan membentuk tubuh Ilmu Kepolisian

6.2. Dengan demikian di Indonesia pertumbuhan Ilmu Kepolisian akan didasarkan pada pendekatan interdisipliner, melalui pentahapan multicross, dan trans-disipliner, untuk kemudian akan menyatu menjadi disiplin Ilmu Kepolisian, yang mono-disiplin. <sup>17)</sup>.

6.3. Sebagai seorang ilmuwan diluar Ilmu Kepolisian, beliau tidak dengan jelas menentukan Objek studi, dan diserahkan kepada sivitas akademika PTIK untuk menyusun Ilmu Kepolisian dengan arahan tersebut.

6.4. Pandangannya tentang perkembangan ilmu pada umumnya nampaknya sejalan dengan pandangan Menteri P.D.K. Prof. Dr. DAUD YUSUF, yang diucapkannya pada pidato pelantikannya sebagai Dekan PTIK.

6.5. Berdasar arahan akademis tersebut, Ilmu Kepolisian dikembangkan dan dijabarkan didalam Kurikulum PTIK.

6.6. Perkembangan Ilmu Kepo-

lisian ini terang berbeda dengan konsep yang dikembangkan oleh Drs. MOERSALEH MSC maupun konsep-konsep lainnya.

#### Kesimpulan :

1. Dalam perjalanan sejarah, studi tentang masalah kepolisian mengalami berbagai bentuk (di Jerman, Belanda dan Amerika Serikat) serta perbedaan dalam objek studinya.
2. Namun demikian, eksistensi Ilmu tentang kepolisian ada, hanya nama ilmunya berubah robah dan tidak mempunyai pengertian yang seragam (Politie wetenschap dan Politiewetenschappen, Politiekunde, Police Sciences dan Police Science).
3. Terdapat beberapa aliran dan teori tentang studi Polisi. Di PTIK terdapat beberapa konsep tentang Ilmu Kepolisian. Konsep apa yang sekiranya terbaik untuk dikembangkan pada program studi Ilmu Kepolisian disini.
4. Ilmu selalu berkembang, bersifat tentatif dan tak akan pernah tuntas, malahan selalu harus menghadapi pengujian (falsifikasi)<sup>18)</sup>.
5. Memang benar: VIRI DOKTISSIME DISENTUANT.  
Pendapat-pendapat para sarjana adalah berbeda-beda.

#### Catatan :

1. Dr. CYRILLE FIJNAUT: Over de traditie van de Politiewetenschap in West Europa. Nederlandse Politie Akademie: Theoretische opstellen rondom de Politie. Apeldoorn 1983.
2. Ibid. hal. 23.
3. Ibid. hal. 28.
4. Ibid. hal. 24.
5. Ibid. hal. 37.
6. Mr.P.van LOCHUM: Op weg naar een Politiekunde. Ned. Politie Akademie: Theoretische opstellen rondom de Politie. Apeldoorn 1983.
7. Mr, P. Van LOCHUM: OP weg een Politiekunde. Ned. Politie Akademie: Theoretische opstellen rondom de Politie. Apeldoorn 1983.
8. Tentang Teori Polisi:  
EGON BITTNER: The functions of the Police in Modern Society. O,G&H Publ. Cambridge 1980. Hal. 119.  
DAVID BALLEY: Police and society. Beverly Hills, London 1977 Hal. 237.  
SAM SOURYAL: Police Administration and Management. West Publ. Co. St. Paul 1977. Hal. 32 dst-nya.
9. NIEDERHOFFER DAN A. BLUMBERG: The ambivalent Force. Dreyden Press, Hindsdale III. 1976. Hal 389 dst.nya.

10. Ibid Hal. 377 dst.nya.
11. Drs. MOERSALEH MSC: Ilmu Kepolisian. Jakarta 1987 Hal. 37.
12. JOHN L. SULLIVAN: Introduction to Police Science. Mc. Graw Hill 1966.
13. JACK R. GREENE: Managing Police Work. Sage Publ. Beverly Hill 1982 Hal. 80.
14. JACK E. WHITEHOUSE: Police Bibliography. A.M.S. Prod. 1980.
15. HADI SAPUTRO: Prof. Mr. Djokoetono, Pelopor perkembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia. dalam GURU PINANDITO. Penerbit Fak. Ekonomi U.I. 1984 Hal. 587 dts.nya.
16. Drs. MOERSALEH MSC: Ilmu Kepolisian. Jakarta 1987.
17. PROF. DR. Harsya W. BACHTIAR: Ilmu Kepolisian: Suatu Bibliografi. Jakarta 1990.
18. ALFONS TARYADI: Epistimologi. Pemecahan masalah menurut KARL R. POPPER. Penerbit Gramedia 1989.

